



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu)

Vivi Valensya Br Karo, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting, Lamria Sagala

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2022

Disetujui Juni 2022

Dipublikasikan Juni 2022

Keywords:

Apparatus Competence;
Community Participation;
Commitment of
Village Government
Organizations;
Accountability of Village
Fund Management.

Abstract

This study aims to determine the effect of apparatus competence, community participation, commitment of village government organizations on the accountability of Village Fund management in Aji Jahe, Aji Buhara and Aji Julu Villages. This type of research is causal associative research with a quantitative approach. This research was conducted in Aji Jahe, Aji Buhara and Aji Julu Villages in Karo Regency, Sumut. The population and sample in this study were 41 people. This study uses primary data obtained using a questionnaire. While the data analysis method used in this study is the method of multiple linear regression analysis carried out with the help of SPSS 25 software. The results of this study found that apparatus competence, community participation and commitment of village government organizations have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Aji Jahe, Aji Buhara and Aji Julu Villages. In other results, it can be seen that simultaneously all independent variables have a significant effect on the accountability of village fund management in Aji Jahe, Aji Buhara and Aji Julu Villages.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat Indonesia telah secara aktif mengembangkan desa sebagai arus utama pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan sektor pedesaan adalah dengan menyediakan program pendanaan pedesaan langsung dari anggaran pusat. Program-program ini dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat pedesaan untuk mendorong kemajuan di daerah pedesaan dan bekerja dengan harapan akan kenyamanan sehari-hari. Sistem pemerintahan Indonesia yang sedang berjalan berfokus pada desa sebagai tolak ukur dalam proses pemerintahan.

Penetapan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan cara bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memajukan pembangunannya dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensinya lebih baik

lagi. Ketentuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengukuhkan keberadaan desa sebagai sasaran pembangunan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang bermutu tidak dapat dihasilkan tanpa keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dari data pelaporan keuangan yang akan dihasilkan (Aziiz dan Prastiti, 2019). Kompetensi dicirikan sebagai kebutuhan mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan ataupun melaksanakan pekerjaan bersumber pada pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja (Pratiwi dan Dewi, 2021). Keterlibatan masyarakat juga diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tanpa peran partisipatif masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Dengan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam setiap aktivitas desa, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat dicapai dengan baik (Dewi dan Erlinawati, 2020).

Aspek lain yang mempengaruhi akuntabilitas ialah komitmen organisasi. Aulia (2018) menemukan bahwa komitmen organisasi yang baik dengan masyarakat umum menguntungkan sistem akuntabilitas. Komitmen organisasi adalah sikap atau kemauan setiap individu yang bekerja pada suatu organisasi/instansi pemerintah dan tertarik pada budaya, tujuan, dan sasaran organisasi yang masih diinginkan individu tersebut. Dengan kata lain, dapat eksis dalam organisasi/instansi pemerintah untuk mencapai kelangsungan dan tujuan organisasi (Nurdin dan Wijaya, 2019).

Akuntabilitas adalah kontrol penuh perangkat atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai agen merupakan faktor penting dalam akuntabilitas kinerja pemerintah kepada klien atau rakyat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. (Widyatama, Novita dan Diarespati, 2017). Akuntabilitas sebagai kendali penuh atas perangkat pengelolaan uang desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, kedudukan pemerintah, kedudukan agen, merupakan unsur utama pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah (Widyatama, Novita dan Diarespati, 2017).

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Ajijahe, Aji Buhara dan Aji Julu

Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Selisih %
Aji Jahe	1.497.074.400	1.484.225.400	0,85
Aji Buhara	979.941.775	953.241.775	2,72
Aji Julu	1.548.033.000	1.538.033.000	0,66

Sumber : Kantor Desa Aji Jahe, Aji Buhara dan Aji Julu, 2021

Diketahui bahwa dana desa yang terdapat pada Desa Aji Jahe, Aji Buhara, dan Aji Julu dalam realisasinya masih terdapat selisih yang merupakan sisa anggaran dana desa yaitu sebesar 0,85%, 2,72% dan 0,66%. Sisa dana desa ini merupakan sisa anggaran dana desa yang tidak dipergunakan oleh desa dalam periode tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA**Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Agency theory atau teori keagenan adalah hubungan antara *principal* dan agen. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Mengenai masalah keagenan, pengungkapan pelaporan keuangan oleh organisasi sektor publik adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Di dalam pelaporan keuangan, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada pengguna informasi keuangan pemerintah yang memiliki peran dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Widyatama, Novita dan Diarespati 2017).

Implikasi dari teori keagenan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa adalah bahwa pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa (agen). Dalam organisasi sektor publik, prinsipal adalah masyarakat dan agen adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Adanya asimetri informasi ini dapat menyebabkan agen fraud dan korupsi. Sebagai bagian integral dari pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa diharapkan dapat memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, memberikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas dan transparansi mengharuskan mereka yang memegang posisi kepercayaan publik bertanggung jawab kepada masyarakat umum atas pencapaiannya dan memberikan informasi terbuka tentang laporan pengelolaan keuangan desa. Asimetri informasi yang terjadi dapat dikurangi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Semakin sedikit asimetri informasi, semakin kecil kemungkinan mengalami masalah dalam mengelola dana desa.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Akuntabilitas dalam manajemen dana adalah tanggungjawab, atau penjelasan bagi pihak yang berhak atau berwenang untuk menanggapi kinerja dan perilaku individu/penanggung jawab dalam suatu unit organisasi dan meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan (Simanjuntak et al., 2020). Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa konsep akuntabilitas merupakan “kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab berdasarkan berhasil atau tidaknya misi suatu organisasi untuk mencapai suatu hasil tertentu melalui media akuntabilitas yang dilakukan secara berkala”.

Hasniati (2016) menyatakan bahwa “berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan dengan tanggung jawab langsung”. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa menjadi penting untuk mendorong keberhasilan kegiatan di tingkat desa.

Secara khusus, seiring dengan digulirkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 Pasal 9 Ayat 2 tentang pendapatan desa yang berasal dari kelompok transfer yaitu jenis dana desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) di tahun 2015, maka salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hal ini tidak terlepas dari jumlah dana desa yang dibayarkan setiap tahunnya yang meningkat secara signifikan di setiap desa, berjumlah triliunan atau ratusan juta rupiah. Dalam konteks pemerintahan, tidak ada pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali jika pemerintah memberi tahu publik tentang pengumpulan, sumber pendanaan, dan penggunaan sumber daya masyarakat.

KOMPETENSI APARATUR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan,

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan Sarah, Taufik dan Safitri (2020) mengatakan bahwa “Aparatur yang kompeten mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.” Kompetensi yang baik membantu aparat desa memahami dan melaksanakan tata cara pengelolaan dana desa dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Kurniawan, et. al., (2015), partisipasi adalah “proses yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi arah strategi dan kebijakan pembangunan dipimpin pemerintah, dan terlibat dan bertanggung jawab pemimpin dari melaksanakan program pembangunan secara merata”.

Partisipasi masyarakat adalah proses melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dalam proses masyarakat yang ada, memilih dan memutuskan alternatif pemecahan masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007).

KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Komitmen adalah kemampuan untuk mendapatkan rasa bertanggung jawab atas sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya dengan kemampuan, pengetahuan atau bakat. Komitmen yang kuat memungkinkan kita untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya fisik, mental dan spiritual yang tersedia didapatkan seseorang, dan sebaliknya, sulit melakukannya dengan baik tanpa komitmen (Simanjuntak, 2005).

Komitmen pada organisasi adalah aspek perilaku yang dapat digunakan karyawan untuk memberdayakan mereka agar tetap tinggal di organisasi. Keterlibatan karyawan sangat penting, terutama di perusahaan nirlaba dimana gaji tidak kompetitif (Aprilya dan Fitria, 2020). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk memperkuat akuntabilitas, diperlukan kompetensi. Kompetensi aparatur merupakan keahlian mutlak yang dibutuhkan perangkat desa, merupakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan sehingga pengelolaan dana desa perkembangan berbagai aspek memajukan pembangunan desa yang optimal.

Sehubungan pengelolaan dana desa, perangkat desa harus memiliki kapasitas yang besar untuk dapat mengelola dan melaporkan dana desa karena aparat desa yang memiliki kemampuan mengelola dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019). Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh cara kepala desa mengelola dana yang diberikan. Dalam hal ini kewenangan aparatur pemerintah desa sangat penting agar dana desa dapat terserap dengan baik, terutama kewenangan kepala desa itu sendiri (Agustini, 2017).

Pentingnya kemampuan staf untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh survei yang dilakukan oleh Giriani, Dahtiah, dan Burhany (2021) di desa-desa di kecamatan Batujajar. Demikian pula hasil penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019); Fajri, Agusti dan Julita (2021); dan Rifa'i, Jubertus dan Susanti (2021) yang berhasil menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Kompetensi Aparatur berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) menemukan dalam penelitian mereka bahwa “Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diperkuat melalui keterlibatan masyarakat yang lebih besar”. Menurut Sujarweni (2015), partisipasi dalam masyarakat adalah “suatu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan masyarakat memiliki hak dan peran positif dalam keputusan yang dibuat untuk keberlangsungan sistem pemerintahan”.

Partisipasi dalam masyarakat adalah proses mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat, menentukan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, menerapkan cara-cara untuk memecahkan masalah, dan melibatkan masyarakat dalam menilai perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

Mendukung hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan, Wijayanti dan Suhendro (2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Arifiyanto dan Kurrohman (2017) juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

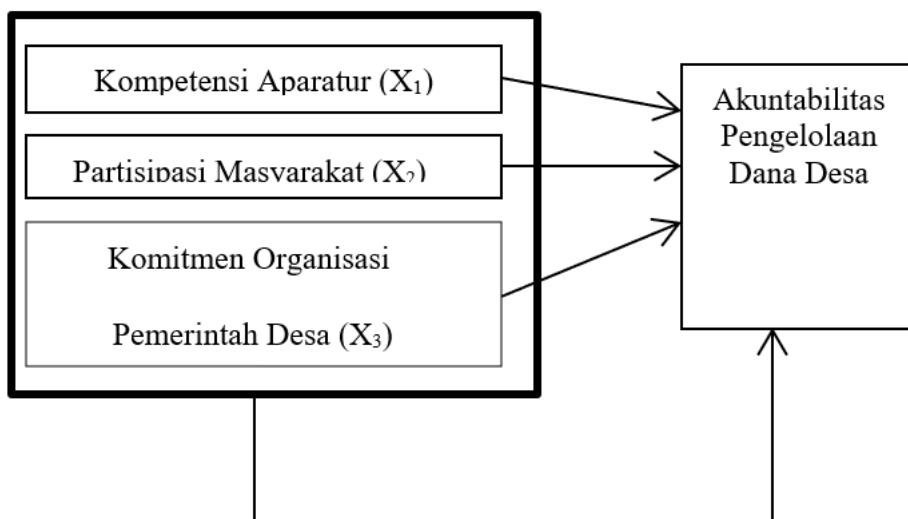
Komitmen organisasi merupakan alat psikologis yang memandu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kontribusi organisasi yang lebih baik mendorong keberhasilan akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas keuangan (Mada, Kalangi dan Gamaliel, 2017). Menurut Nurdin dan Wijaya (2019), komitmen organisasi adalah “sikap atau kemauan setiap orang yang tergabung dalam suatu organisasi/instansi pemerintah dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi yang masih diinginkan oleh individu tersebut”. Dengan kata lain, dapat bertahan dalam organisasi/institusi untuk mencapai dan mempertahankan tujuan organisasi .

Penelitian untuk memperkuat hal tersebut dilakukan oleh Zulkifli et. al., (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Astini (2019); dan Tarjo (2019) juga menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian ini disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer serta metode koleksi data melalui teknik survei (Situmorang & Simanjuntak, 2021) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Survei dilakukan kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kemudian

melakukan pencocokan dengan indikator tiap variabel penelitian yang digunakan (Simanjuntak & Silitonga, 2020). Penelitian ini menggunakan data primer serta menggunakan asosiatif kausal.

Penelitian ini bersifat asosiatif kausal atau sebab akibat. Populasi sebagai bidang umum yang terdiri dari obyek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018) dan (Siahaan & Simanjuntak, 2020).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa yang terdapat di Desa Aji Jahe, Aji Buhara dan Aji Julu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo berjumlah 41 orang. Menurut Sugiyono (2018) “sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk menilai sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah perangkat atau kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada perangkat atau kuesioner tersebut dapat mengatakan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

Maka disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing indikator dan komposisi total masing-masing mengindikasikan validitas yang kuat dari tiap variabel dengan adanya data $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu validitas item seluruh pernyataan sudah dipastikan dan dapat digunakan.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner bisa dikatakan handal atau reliabel apabila tanggapan seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

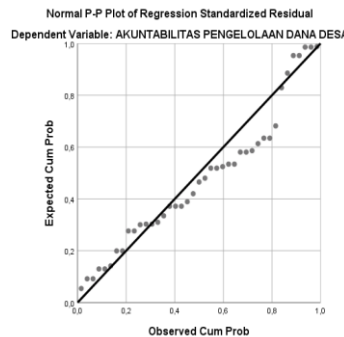
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X1)	6	0,920	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	6	0,920	Reliabel
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X3)	6	0,919	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	7	0,935	Reliabel

Bisa dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan memakai uji grafik yaitu dengan melihat normal probability plot dalam contoh penelitian yang dilakukan.



Gambar 2. Uji Normalitas Probability Plot

Dapat dilihat berdasarkan gambar, bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hasil ini menandakan bahwa model regresi layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendukung hasil uji normalitas yang dilakukan dari uji grafik di atas, maka peneliti juga melakukan uji normalitas secara statistik dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		41	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,59099451	
Most Extreme Differences	Absolute	,165	
	Positive	,165	
	Negative	-,081	
Test Statistic		,165	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig	,189 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,179
		Upper Bound	,199

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0.199 yang lebih besar dari 0.05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

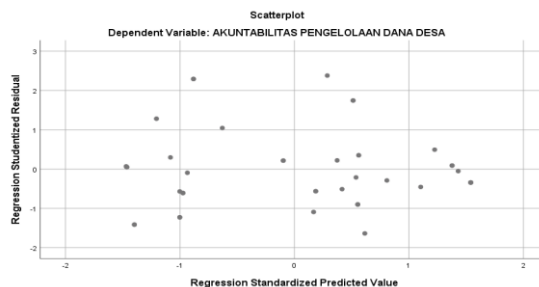
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas (independen). Maka dari Tabel 4 di bawah ini bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada interaksi variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMPETENSI APARATUR	,340	2,944
	PARTISIPASI MASYARAKAT	,232	4,310
	KOMITMEN ORGANISASI	,331	3,017
	PEMERINTAH DESA		

Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan buat menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians berdasarkan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari output uji heteroskedastisitas bisa dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,901	1,150		2,523	,016
	KOMPETENSI APARATUR	-,060	,067	-,243	-,897	,376
	PARTISIPASI MASYARAKAT	,066	,085	,258	,786	,437
	KOMITMEN ORGANISASI	-,076	,079	-,263	-,956	,345
	PEMERINTAH DESA					

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan analisis data dengan regresi linier menggunakan software statistik SPSS versi 25.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X₁ : Kompetensi Aparatur
- X₂ : Partisipasi Masyarakat
- X₃ : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- ε : Koefisien error

Uji Hipotesis

Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) secara simultan. Pengaruh ini harus diuji untuk melihat apakah model regresi ini dapat dilanjutkan dengan melakukan uji t (parsial) atau tidak.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	705,530	3	235,177	85,941	,000 ^b
	Residual	101,251	37	2,737		
	Total	806,780	40			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

b. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 85,941 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,86. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $85,941 > 2,86$ dan nilai signifikan 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan.

Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > 0.05$, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < 0.05$, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,273	1,798		,708	,483
KOMPETENSI APARATUR	,405	,104	,388	3,882	,000
PARTISIPASI MASYARAKAT	,278	,132	,255	2,105	,042
KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA	,459	,124	,374	3,694	,001

1. Tingkat signifikansi untuk kompetensi aparatur adalah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,405 dan nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi aparatur adalah sebesar 3,882 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,026192. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,882 > 2,026192$. Hasil ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Tingkat signifikansi untuk partisipasi masyarakat adalah sebesar 0.042 yang lebih besar dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dan nilai t_{hitung} untuk variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 2,105 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,026192. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,105 > 2,026192$. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Tingkat signifikansi untuk variabel komitmen organisasi pemerintah desa adalah sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,459 dan nilai t_{hitung} untuk variabel komitmen organisasi pemerintah desa adalah sebesar 3,649 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,026192. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,649 > 2,026192$. Hasil ini menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinan pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model memberitahukan variasi variabel dependen. Range nilainya antar 0-1, jika nilai Adjusted R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan kebalikannya jika Adjusted R² besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Berdasarkan tabel di bawah, besarnya nilai Adjusted R Square merupakan 0.864 yang berarti sebesar 0.864 atau (86,4%) variabel independen yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa bisa menyebutkan atau mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya sebesar 13,6% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,935 ^a	,875	,864	1,654

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu.
2. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu.
3. Komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu.
4. Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu.

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang bisa disampaikan penelitian terkait dengan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan supaya peneliti memakai faktor-faktor yang berbeda yang diduga bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana

desa pada desa yang lainnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen selain variabel yang sudah diuji pada penelitian ini seperti motivasi kerja, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengawasan dan sebagainya.

2. Penelitian ini memakai data primer yang peneliti peroleh dengan memakai metode kuesioner, untuk lebih mendapatkan hasil yang sebenarnya diharapkan penelitian selanjutnya bisa merubah jenis data yaitu dengan memakai data sekunder yang berupa angka-angka yang sudah diproses.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 desa yang telah peneliti tentukan di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yaitu Desa Aji Jahe, Aji Buhara dan Aji Julu, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti seluruh desa yang ada di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara agar penelitian dapat menggambarkan secara umum akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Agustini, Firly Nur. 2017. “Pentingnya Kompetensi Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”. Tersedia pada <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-48.pdf>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-20.
- Arifiyanto, D. F., dan Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3). 481-493.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Sekecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aulia, P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1(1), 1-15.
- Astini, Y. 2019. Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Valid*. 16 (1). 29-47.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280-344.
- Dewi, N. W., & Erlinawati, N. A. 2020. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa Pada Kantor Desa Se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Hita Akuntansi dan Keuangan, 273-298.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. 2021. Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(3), 321-336.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol 1, No.3, 480 – 492.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*. Universitas Hasanuddin: Makasar, 2(1), 15-30.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Jensen, M., C. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure". *Journal of Finance Economic*
- Kurniawan, M. A., Soemarno, & Purnomo, M. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang. *Program Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya*. Malang. *Jurnal-PAL*, Vol.6, No. 2.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106-115.
- Mardiasmo., 2017. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. 2019. Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1), 1-20.
- Rifa'i, M., Jubertus, & Susanti, R. A. 2021. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919-928.
- Sujarweni, V. Wiranata. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL*, 2(2), 162-172.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 183-198.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330-342.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Ut. *JURNAL MANAJEMEN Open*, 6(2), 129–138. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AjAayn0AAAAJ&citation_for_view=AjAayn0AAAAJ:4T0pqqG69KYC
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.4312>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarjo. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo). *Jurnal Tata Sejuta*, 5(2), 332-346.

Umaira, S., & Adnan. 2019. Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471-481.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, 1-20.

Zulkifli, Sulaiman, Wahyudi, R., & Martini, R. 2020. Peran Kompetensi , Komitmen, dan Partisipasi Masyarakat Bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, 6(2), 106-113.